



Analisis

PAGU ANGGARAN

2025

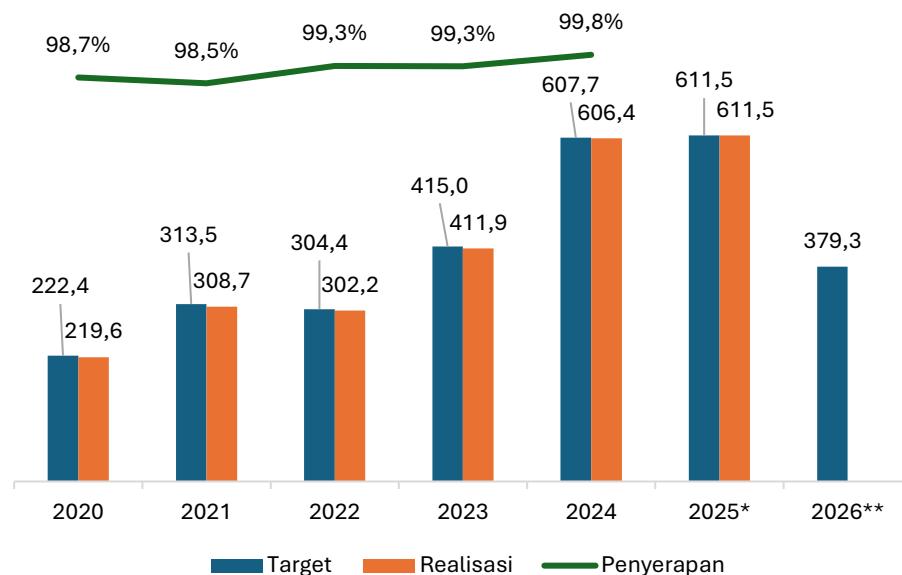
Pagu Anggaran Mahkamah Konstitusi 2026: Optimalisasi Dukungan Sistem Informasi

Kinerja Anggaran MK

Selama periode 2020–2025, anggaran Mahkamah Konstitusi (MK) mengalami **kenaikan signifikan** dari Rp222,4 miliar (2020) menjadi Rp611,5 miliar (APBN 2025) atau meningkat hampir tiga kali lipat. Peningkatan ini mencerminkan adanya **penguatan dukungan terhadap peran MK** dalam sistem ketatanegaraan, khususnya dalam menjaga konstitusi, memutus sengketa hasil pemilu, serta menegakkan prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Namun pada **RAPBN 2026**, **anggaran MK menunjukkan penurunan sangat besar yaitu 38%** menjadi Rp379,3 miliar. Penurunan ini menjadi tantangan bagi MK dan perlu dicermati karena berpotensi memengaruhi kapasitas MK dalam menjalankan tugasnya.

Dari sisi penyerapan, rata-rata tingkat realisasi anggaran MK selama 2020–2024 tercatat sangat tinggi yaitu mencapai 99,1%. Tingkat penyerapan ini mengindikasikan bahwa **program kerja MK dapat diimplementasikan sesuai rencana dan alokasi**, sekaligus menunjukkan kapasitas manajerial yang baik dalam mengelola anggaran secara efektif dan efisien.

Gambar 1. Perkembangan Anggaran (Miliar Rupiah)



*) Realisasi outlook

**) RAPBN TA 2026

Sumber: LKPP 2020-2024, Nota Keuangan APBN TA 2025, Nota Keuangan RAPBN TA 2026

Jika ditelaah lebih rinci pada tingkat program, alokasi anggaran MK dalam Nota Keuangan RAPBN 2026 memperlihatkan dinamika yang cukup signifikan dibandingkan APBN 2025. Program Dukungan Manajemen hanya mengalami penurunan sebesar 0,2%, yaitu dari Rp178,1 miliar (2025) menjadi Rp177,8 miliar (2026). Sementara itu, **Program Penanganan Perkara Konstitusi** **justru mengalami penurunan tajam sebesar 53,5%**, dari Rp433,4 miliar (2025) menjadi hanya Rp201,5 miliar (2026). Secara keseluruhan, total anggaran MK berkurang 38%, yaitu dari Rp611,5 miliar menjadi Rp379,3 miliar.

Tabel 1. Anggaran Per Program (Miliar Rupiah)

PROGRAM	2025	2026	%
Dukungan Manajemen	178,1	177,8	-0,2
Penanganan Perkara Konstitusi	433,4	201,5	-53,5
TOTAL	611,5	379,3	-38,0

Sumber: Nota Keuangan APBN TA 2025, Nota Keuangan RAPBN TA 2026

Belum Optimalnya Dukungan Sistem Informasi MK guna menunjang Kinerja

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas manajemen pelayanan peradilan perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) di Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun Anggaran 2023 hingga Semester I 2024, ditemukan bahwa MK belum sepenuhnya berhasil menyelenggarakan layanan peradilan yang efektif, efisien, tertib, dan tepat waktu. Permasalahan ini bukan hanya bersifat teknis administratif, melainkan juga menunjukkan kelemahan sistemis dalam tata kelola internal, mulai dari aspek regulasi, pemanfaatan teknologi informasi, hingga pengawasan mutu layanan. Beberapa persoalan mendasar meliputi belum terintegrasi sistem informasi perkara (SIMPEL, SIMPPK, dan e-Minute) secara menyeluruh, ketidadaan SOP yang komprehensif untuk seluruh tahapan pelayanan peradilan, serta keterlambatan dalam pengiriman salinan putusan kepada para pihak dan pemutuan putusan ke dalam Berita Negara. Selain itu, sarana persidangan jarak jauh yang disiapkan belum dimanfaatkan secara optimal, dan masih ada ketidaktertiban dalam pencatatan administrasi perkara.

Kondisi tersebut berdampak pada pencapaian sasaran strategis MK yang ingin mewujudkan layanan peradilan yang modern dan terpercaya. Jika tidak segera dibenahi, kelemahan ini **berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap MK dan menghambat fungsi konstitusionalnya sebagai penjaga konstitusi**. BPK merekomendasikan agar MK segera memperbaiki sistem informasi secara terintegrasi, menyusun regulasi teknis yang memadai, melengkapi SOP, serta memperkuat pengawasan internal atas mutu layanan peradilan.



Analisis **PAGU ANGGARAN** 2025



PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA

BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI Lantai 6
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270
www.bk.dpr.go.id